

**STRATEGI KOMUNIKASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DALAM SOSIALISASI DAN MENURUNKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN
BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Skripsi

OLEH :

ISKANDAR MUDA

13.853.0008



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)

**STRATEGI KOMUNIKASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM MENURUN
KANTINGKAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SIKRIPSI

Oleh :

ISKANDAR MUDA

NPM :13.8530008

Program studi: ILMU KOMUNIKASI

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana di Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merukan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksilainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 oktober 2017



Iskandar muda
13.8530008

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi Strategi komunikasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam sosialisasi dan menurunkan penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Iskandar Muda

Npm 13.853 0008

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui oleh
Komisi Pembimbing

Drs. H. Syafruddin Ritonga MAP
Pembimbing I

Drs. Bahrum Jamil MAP
pembimbing II



Prof. Dr. H. Arif Nasution MA
Dekan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)

ABSTRAK

**STRATEGI KOMUNIKASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DALAM SOSIALISASI DAN MENURUNKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN
BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Oleh

Iskandar Muda

13.853.0008

Komunikasi sangat diperlukan dalam dunia organisasi. Aktifitas seorang Staf tidak terlepas dari komunikasi dengan masyarakat dan antar staf. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana efektifitas komunikasi organisasi antara staf dan komunikasi sosial antara staf dengan masyarakat dalam menerapkan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang diterapkan organisasi dalam menyukseskan program – program dari Badan Narkotika Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dimana yang menjadi narasumber data adalah 3 staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Di bantu beberapa staf di bagian – bagian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di lapangan wawancara mendalam dengan narasumber dan studi pustaka. Dilanjutkan dengan tehnik analisis data interaktif dimulai dari penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran komunikasi sangat penting dalam penerapan program P4GN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi dan komunikasi sosial yang dilakukan staf adalah melakukan kegiatan – kegiatan dan pendekatan kepada masyarakat menganalisis kebutuhan disetiap daerah dan efektifitas strategi komunikasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Komunikasi Sosial, Strategi Komunikasi

ABSTRACT

**STRATEGI KOMUNIKASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DALAM SOSIALISASI DAN MENURUNKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN
BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

By

Iskandar Muda

13.853.0008

Communication is necessary in the organization. The activities of a *Staff* cannot be separated from the communication between society and other *Staff*. This research describes how the effectiveness of communication between the *Staffs* and social communication between *Staff* and the society in applying the Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) program from National Anti-Narcotics Agency of South Tapanuli Regency. This research aims to determine the strategy of communication applied by the organization in the success of programs from National Anti-Narcotics Agency of South Tapanuli Regency. This research used Qualitative research where the source data are 3 *Staff* of National Anti-Narcotics Agency of South Tapanuli Regency in a helping hand of the *Staffs*. The data is collected by direct observation in the field of in-depth interview with the source and literature study. It followed by technique of interactive data analysis starting from simplifying the data, presenting the data and drawing the conclusion. From the results of this research can be seen that the role of communication is very important in applying the P4GN program. The results of this research indicate that organizational communication and social communication which is conducted by *Staff* are to do the activities and approaches to the society to analyze the requirements in each region and the effectiveness of communication strategy of National Anti-Narcotics Agency of South Tapanuli Regency.

Key word: Organizational Communication, Social Communication, Strategy of Communication

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Menurunkan Tingkat Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” ini dapat diselesaikan sebaik – baiknya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs.H.Syafruddin Ritonga MAP, Drs Bahrum Jamil, MAP, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada bapak Drs Novri MM, selaku sekretaris yang bersedia mendampingi penulis, dan kepada seluruh staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Kemudian kepada Bapak Drs.H.Bahori Hr selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan beserta staf yang ikut berpartisipasi yang telah menerima peneliti selama melaksanakan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ucapan terima penulis ucapkan kepada kedua orang tua, abang dan adik serta sahabat yang memberikan semangat dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini. Untuk semua yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih.

Medan, April 2017

Penulis

Iskandar Muda

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
Bab II Landasan Teori	
2.1 Pengertian Komunikasi	6
2.1.1 Proses Komunikasi	6
2.1.2 Fungsi Strategi Komunikasi.....	7
2.1.3 Korelasi Antar Komponen dalam Strategi Komunikasi	8
2.2 Komunikasi Sosial	11
2.2.1 Fungsi Komunikasi Sosial	11

2.3 Komunikasi Organisasi	11
2.3.1 Teori Struktural Klasik	14
2.3.2. Karakteristik Birokrasi Weberian	15
2.4 Ruang Lingkup Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).....	18

Bab III Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian	26
3.2 Sumber Data.....	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.3 Instrumen Penelitian	29
3.4 Teknik Analisis Data.....	30
3.5 Pengujian Kredibilitas Data	32

Bab IV Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 Gambaran Umum BNNK TAPSEL	34
4.1.2 Dasar Hukum	35
4.1.3 Tugas dan Fungsi	35
4.1.4 Visi dan Misi	36
4.1.5 Program Kerja	36
4.1.6 Struktur Organisasi	37
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	40
4.2.1 Dasar Hukum Tentang Narkotika	40
4.2.2 Jadwal Penelitian	42
4.2.3 Wawancara	43

4.2.4 Hasil Penelitian 44

Bab V

Kesimpulan 56

Saran 58

Daftar Pustaka



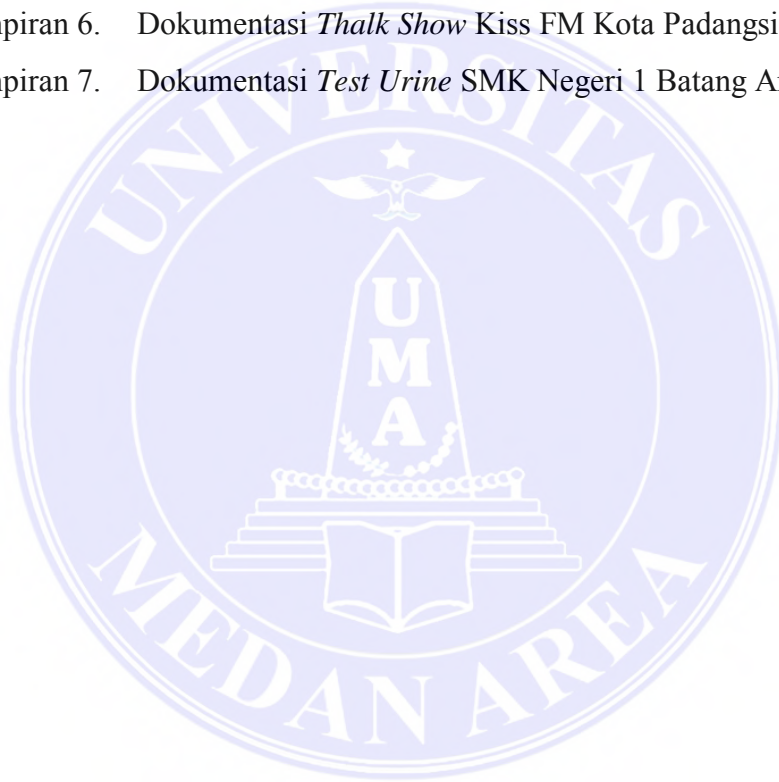
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi BNNK TAPSEL	39
Tabel 2. Jadwal Penelitian	42
Tabel 3. Data Pengguna Tahun 2016	48



LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar pertanyaan wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Asistensi di Kecamatan Batang Angkola
- Lampiran 3. Dokumentasi *Focus Group Discussion* (FGD) SMP Negeri 2 Batang Angkola
- Lampiran 4. Dokumentasi Jejaring Batang angkola
- Lampiran 5. Dokumentasi Raker di Desa Sorik Batang Angkola
- Lampiran 6. Dokumentasi *Thalk Show* Kiss FM Kota Padangsidempuan
- Lampiran 7. Dokumentasi *Test Urine* SMK Negeri 1 Batang Angkola



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan	34
Gambar 2. Wawancara 3 Narasumber	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba istilah lain di Indonesia yaitu Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Narkoba atau Napza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaannya. Narkoba adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu.

Permasalahan narkoba di Indonesia terus meningkat dan merambat hingga ke wilayah terpececil dan telah menyebar ke segala usia dan status sosial termasuk di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketidakstabilan ekonomi, sosial dan keamanan membuat Kabupaten Tapanuli Selatan rentan dengan peredaran gelap Narkoba. Faktor individu, lingkungan, ketidak-taatan terhadap agama, antara lain merupakan faktor penyebab terhadap penyalahgunaan Narkoba. Melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan (BNNK Tapsel) terus berusaha menurunkan dan menanggulangi masalah narkoba dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan program program kerja P4GN.

BNNK Tapsel telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyukseskan program P4GN dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang ada, dengan cara membangun kerja sama yang baik dengan media cetak maupun media

elektronik dan melakukan kegiatan – kegiatan serta kebijakan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menyebarkan informasi.

Penyalahgunaan Narkoba tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia). Pada era sembilan puluhan, pemakai narkoba sudah masuk segala lapisan baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. (Hari Sasangka 2003:2), Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,

Penyalahguna narkotika yang telah terbukti bersalah dan diputuskan oleh hakim untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, dalam Undang-Undang Narkotika bahwa terhadap narapidana narkotika dilakukan perawatan maka di Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan hal tersebut sebagai bagian dari pembinaan.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah, salah satu tugas dan fungsinya adalah untuk menanggulangi bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan serius. Terlebih, peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Saat ini, situasi global

perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

Kurangnya efektifnya komunikasi merupakan salah satu penghambat besar dalam ketidak sadaran manusia akan bahaya-bahaya narkoba.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mencoba menulis laporan tugas akhir dengan judul **“Strategis Komunikasi Badan Narkotika Nasional Dalam Sosialisasi dan Menurunkan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.**

1.2 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan semakin maraknya kasus narkoba dikalangan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, maka pemerintah semakin memperkuat peran serta kewenangan dari Badan Narkotika Nasional dalam hal proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah strategis komunikasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melakukan sosialisasi di kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Apa saja yang menjadi penghambat dari komunikasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Strategi komunikasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan (BNNK Tap.Sel).
2. Pola – pola komunikasi apa yang dilakukan.
3. Media apa saja yang digunakan BNNK Tapsel dalam melakukan sosialisasi.
4. Seberapa sering frekuensi sosialisasi yang dilakukan oleh BNNK.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diantaranya:

1. Membantu pihak kantor Badan Narkotika Nasional dalam hal sosialisasi Ilmu Komunikasi kepada masyarakat.
2. Mendapat masukan berupa ide-ide baru, saran, dan gagasan bagi kantor Badan Narkotika Nasional menyangkut penanganan masalah komunikasi pihak Badan Narkotika Nasional dalam masyarakat.
3. Memberikan uji nyata atas disiplin ilmu yang diperoleh mahasiswa selama masa perkuliahan kedalam dunia kerja khususnya di bidang ilmu komunikasi serta hubungan masyarakat.
4. Menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis tentang strategis komunikasi Badan Narkotika Nasional dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba.
5. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

Sebelum membahas mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang berpotensi komunikasi dan hubungan masyarakat, maka dalam bab ini akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul tersebut diatas.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, strategi adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk *unique* berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr yang dikutip dalam buku Fandy Tjiptono (2000:3) dalam bukunya mengatakan bahwa pengertian strategi dapat diartikan dua perspektif yang berbeda yaitu dari perspektif apa yang organisasi lakukan. Berdasarkan perspektif apa pertama, pengertian strategi adalah sebuah program, untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya.

Berikut ini adalah beberapa teori dasar yang berhubungan dengan judul yang dipilih oleh penulis:

2.1 Pengertian Komunikasi

Suranto Aw (2010:2) Komunikasi berasal dari bahasa Latin *communicare* yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris *communication* yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan perasaan, dan lain – lain antara dua orang atau lebih.

Di kemukakan oleh Agus Hermawan, Komunikasi Kemasaran (2012:4) Komunikasi (*communication*) berasal dari bahasa Latin *Communis* yang berarti sama. *Communico* atau *Communicare* yang berarti membuat yang sama (*make to common*). Secara sederhana dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya (*communication depends on our ability to understand one another*) dan kemampuan penyesuaian dari pihak yang dapat berkomunikasi.

Menurut Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi (2009:9) istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata latin *communicatio* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama, sama disini maksudnya adalah sama makna.

Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selagi masih ada kesamaan makna mengenai apa yang di percakapkan.

a. Proses Komunikasi

Onong Uchjana Effendy, (2009:11) proses komunikasi terbagi dua tahap, yakni secara primer maupun skunder.

1. Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan.

2. Proses komunikasi secara skunder

Proses komunikasi secara skunder adalah proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang media pertama.

Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasi karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak.

b. Fungsi Strategi Komunikasi

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai petunjuk tetapi harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan panduan perencanaan komunikasi (*communication planing*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan dalam arti pendekatan (*approach*) bisa berbeda beda waktu tergantung waktu dan kondisi.

R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett dalam buku Onong Uchjana Effendy (2009:32) *Techniques for Effective Communication* fungsi komunikasi strategi.

(*To Secure Understanding*), memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang di terimanya, andaikan komunikan sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimanya harus dibina (*to establish acceptance*) pada akhirnya kegiatan dimotivasi (*to motivate action*).

Strategi komunikasi sudah tentu bersifat makro yang dalam prosesnya langsung secara vertikal piramidal.

c. Korelasi Antarkomponen dalam Strategi Komunikasi

Komunikasi merupakan proses yang rumit. Dalam rangka menyusun strategi komunikasi di perlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor – faktor pendukung dan faktor – faktor penghambat. Akan lebih baik dalam strategi itu diperhatikan komponen – komponen komunikasi dan faktor – faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen tersebut (Onong Uchjana Effendy 2009:35)

1. Mengenali sasaran komunikasi

Sebelum melancarkan komunikasi, kita perlu mempelajari siapa – siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi kita itu. Sudah tentu ini bergantung pada tujuan komunikasi, apakah komunikan hanya sekedar mengetahui atau agar komunikan melakukan tindakan – tindakan tertentu.

2. Pemilihan media komunikasi

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan kita capai, pesan yang akan disampaikan, teknik yang akan dipergunakan mana yang terbaik dari sekian banyak media komunikasi itu tidak dapat ditegaskan dengan pasti sebab masing-masing media mempunyai kelebihan dan kekurangan.

3. Pengkajian tujuan pesan komunikasi

Pesan komunikasi (*message*) mempunyai tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang harus diambil, apakah itu teknik informasi, teknik persuasi, atau teknik instruksi. Apapun teknik komunikasi itu harus mengerti pesan komunikasi itu.

4. Peranan komunikator dalam komunikasi

Ada faktor penting pada diri komunikator bila ia melancarkan komunikasi yaitu daya tarik sumber (*source attractiveness*) dan kredibilitas sumber (*source credibility*).

d. Daya tarik sumber

Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya. Dengan lain perkataan, komunikan merasa ada persamaan antara komunikator dengannya sehingga komunikan bersedia taat pada isi pesan yang di lancarkan oleh komunikator.

e. Kredibilitas sumber

Faktor yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil ialah kepercayaan komunikan pada komunikator. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator

Berdasarkan kedua faktor tersebut, seorang komunikator dalam menghadapi komunikan harus bersikap empatik (*empathy*), yaitu kemampuan seseorang untuk mampu memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. Dengan lain perkataan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seorang komunikator harus bersikap empatik ketika ia berkomunikasi dengan komunikan yang sedang sibuk, marah, bingung, sedih, sakit, kecewa dan sebagainya.

5. Elemen Komunikasi

Menurut Joseph Dominick (2002) setiap peristiwa komunikasi akan melibatkan delapan elemen komunikasi yang meliputi:

1. Sumber
2. Enkoding
3. Pesan
4. Saluran
5. Dekoding
6. Penerima
7. Umpan balik
8. Gangguan

2.2 Komunikasi Sosial

Komunikasi sosial adalah suatu kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Inti konsep integrasi sosial adalah menerima perbedaan antara individu satu dengan individu lain untuk dapat mencapai kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok namun tetap mengakui perbedaan – perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Dalam kasus komunikasi sosial yang melibatkan perbedaan latar belakang strata sosial antar komunikator dengan komunikan. Melalui komunikasi sosial terjadilah aktualisasi dari masalah – masalah yang dibahas makin meluas bertambah. Komunikasi sosial adalah sekaligus suatu proses sosialisasi.

a. Fungsi Komunikasi sosial

Fungsi komunikasi sosial bisa terbentuk dengan adanya konsep diri dan eksistensi diri untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, memperoleh kebahagiaan. Suryanto, (2015:351)

1. Pembentukan konsep diri

Konsep diri adalah pandangan mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa diperoleh dari informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Manusia yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia lain tidak mungkin mempunyai kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Melalui komunikasi dengan orang lain tidak hanya belajar siapa diri kita.

Konsep diri yang paling dini umumnya di pengaruhi oleh keluarga dan orang dekat lainnya, termasuk kerabat. Mereka itulah yang disebut dengan

significant others. orang tua atau siapa pun yang memelihara kita pertama kalinya mengatakan melalui ucapan dan tindakan.

Dalam proses menjadi dewasa, kita menerima pesan dari orang sekitar mengenai siapa diri kita dan harus menjadi apa. Menjelang dewasa, kita menemui kesulitan memisahkan siapa kita dari siapa kita menurut orang lain, dan konsep diri kita memang terkait rumit dengan defenisi yang diberikan orang lain kepada kita. Meskipun berupaya berperilaku sebagaimana yang diharapkan orang lain, kita tidak pernah secara total memenuhi harapan oranglain tersebut. Akan tetapi ketika berupaya berinteraksi dengan mereka, pengharapan, kesan, dan citra mereka tentang kita sangat mempengaruhi konsep diri, perilaku dan apa kita inginkan.

Berdasarkan asumsi – asumsi itu, kita mulai memainkan peran tertentu yang diharapkan orang lain. Apabila permainan peran ini menjadi kebiasaan, kita pun menginternalisasikannya. Kita menamakan peran - peran itu kepada diri kita sebagai panduan untuk berperilaku. Kita menjadikan sebagai konsep panduan untuk berperilaku.

Dalam masa pembentukan konsep diri, kita sering mengujinya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita dapat memperkirakan konsep diri seseorang dengan memerhatikan kata – kata yang orang ucapkan dan dapat menduga dari kelas atau golongan asal.

2.3 Komunikasi Organisasi

Istilah organisasi berasal dari bahasa latin *organizare*, yang artinya secara harafiah berarti paduan dari bagian – bagian yang satu sama lainnya saling

bergantung. Everet M Rogers dalam bukunya *Communication in Organization*, mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepangkatan, dan pembagian tugas. Robert Bonington dalam buku *Modern Business: A System Approach* mendefinisikan organisasi sebagai sarana dimana manajemen mengkoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas - tugas dan wewenang (Ngalimun, S,Pd.,M.Pd., M.I.kom 2017:83)

Menurut R.wayne pace & Don F. Faules di editor Deddy Mulyana (2013:33) komunikasi organisasi adalah “perilaku pengorganisasian” yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi.

Lebih jelasnya, komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara dan mengubah organisasi. Pandangan “objektif” atas organisasi menekankan “struktur” sementara organisasi berdasarkan pandangan “subjektif” menekankan “proses”. Komunikasi lebih dari pada sekedar alat, ia adalah cara berfikir.

Kita dilahirkan di organisasi, menerima pendidikan di organisasi, dan kita tinggal di tengah masyarakat yang bersifat organisasi. Kita menghabiskan banyak waktu untuk menghabiskan waktu untuk berbagai aktivitas seperti bersantai bermain dan berdoa. Hampir semua kegiatan dilakukan di organisasi dan ketika hal itu terjadi. Organisasi dibentuk melalui komunikasi ketika individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan individu dan tujuan bersama.

Komunikasi tidak hanya sekedar instrumen atau alat untuk berinteraksi tetapi komunikasi adalah medium yang menyebabkan adanya organisasi dan karena komunikasi bersifat dinamis maka organisasi yang kita lihat saat ini hanyalah gambaran singkat (*snapshot*) dari proses pembentukannya yang berevolusi sepanjang waktu (Morissan, 2014:383)

a. Teori Struktural Klasik

Blau dan Scott (1962) dalam Deddy Mulyana, Ma.Ph.d (2013:41). Mereka membedakan antartara struktur umum organisasi sosial dan struktur lebih spesifik yang disebut organisasi formal.

1. Organisasi sosial

Organisasi sosial merujuk kepada pola pola interaksi sosial (frekuensi dan lamanya kontak antara orang – orang; kecenderungan mengawali kontak; arah pengaruh antara orang – orang; derajat kerjasama; perasaan tertarik, hormat, dan permusuhan; dan perbedaan status) dan regularitas yang teramati dan perilaku sosial orang – orang yang disebabkan oleh situasi sosial mereka alih – alih oleh karakteristik fisiologis atau psikologis mereka sebagai individu

Adanya pola regularitas dalam interaksi sosial mengisaratkan bahwa terdapat hubungan antara orang – orang yang mentransformasikan mereka dari suatu kumpulan individu menjadi sekelompok orang – orang atau sejumlah kelompok menjadi suatu sistem sosial yang lebih besar.

Hubungan juga berkembang antara kelompok – kelompok dan menghasilkan aspek status sosial yang berbeda. Status kelompok dalam sistem sosial yang lebih

besar menjadi bagian status anggotanya. Berlo (1960) menyarankan bahwa komunikasi berhubungan dengan organisasi sosial melalui tiga cara:

1. Sistem sosial dihasilkan lewat komunikasi. Keseragaman perilaku dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma – norma di hasilkan lewat komunikasi di antara anggota - anggota kelompok.
2. Bila suatu sistem sosial telah berkembang ia menentukan komunikasi anggota – anggotanya. Sistem sosial mempengaruhi bagaimana, ke, dan dari siapa, dan dengan pengaruh bagaimana komunikasi terjadi diantara anggota – anggota sistem.
3. Pengetahuan mengenai suatu sistem sosial dapat membantu kita membuat prediksi yang akurat mengenai orang – orang tanpa duduki dalam sistem

(R. Wayne Pace & Don F. Faules, 2013:41)

2. Organisasi Formal

Berbeda dengan oraganisasi sosial yang muncul manakala orang – orang bersosialisasi yang satu antara yang lainnya, terdapat organisasi – organisasi yang didirikan dengan sengaja untuk tujuan - tujuan tertentu. Bila pencapaian suatu tujuan tertentu memerlukan tujuan bersama, suatu organisasi dirancang untuk mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan banyak individu memberikan rangsangan kepada orang – orang lainnya untuk membantu mereka.

b. Karakteristik Birokrasi Weberian

Deddy mulyana (2013:45) organisasi – organisasi modren, disebut juga organisasi kuno, diorganisasikan berdasarkan teori Weber mengenai organisasi formal. Meskipun Weber menulis karyanya pada tahun 1910, teorinya berfungsi

baik untuk memahami aspek – aspek penting dari sudut pandang struktural klasik dan interaksi komunikatif yang terjadi dalam konteks tersebut, bahkan dewasa ini. Meskipun demikian, teori Weber telah dikritik dan diperbaiki, yang menghasilkan konsep – konsep yang lebih canggih tentang fungsi organisasi. Namun uraian perrow (1973) tentang tumbuh dan jatuhnya teori birokrasi menunjukkan minat yang berlanjut terhadap gagasan - gagasan Weber. Berikut ciri – ciri suatu organisasi terbirokrasian yang ideal menurut analisis Weber:

1. Suatu organisasi terdiri dari hubungan – hubungan yang ditetapkan antara jabatan – jabatan. Blok – blok bangunan dasar dari organisasi formal adalah jabatan – jabatan.

2. Tujuan atau rencana organisasi terbagi kedalam tugas – tugas. Tugas organisasi disalurkan antara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi. Ketentuan kewajiban dan tanggung jawab melekat pada jabatan. Dekripsi kerja (*job description*) tentu saja merupakan salah satu metode untuk memenuhi karakteristik ini. Suatu pembagian kerja yang jelas diantara jabatan – jabatan merupakan implikasi ciri ini yang memungkinkan terciptanya derajat spesialisasi dan keahlian yang tinggi diantara pegawai.

3. Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. Satu –satunya orang yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas – tugas jabatan ketika seseorang secara sah menduduki jabatannya. Weber menyebutkan sebagai kewenangan legal.

4. Garis – garis kewenangan jabatan diatur menurut suatu “tatanan hierarkis”. Hirearkinya mengambil bentuk umum suatu piramida, yang menunjukkan setiap pegawai bertanggung jawab kepada atasannya atas keputusan – keputusan

bawahannya serta keputusan – keputusannya sendiri. Ruang lingkup kewenangan atasan atas bawahan secara tegas dibatasi. Konsep – konsep komunikasi ke atas (*upward communication*) dan komunikasi ke bawah (*downward communication*) mencerminkan konsep kewenangan ini dengan informasi mengalir kebawah dari jabatan yang memiliki kewenangan lebih luas ke jabatan yang memiliki kewenangan lebih sempit.

5. Suatu sistem aturan dan regulasi yang umum tapi tegas, yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan – tindakan dan fungsi – fungsi jabatan dalam organisasi. Banyak usaha administrator dalam organisasi digunakan untuk menerapkan regulasi umum tersebut kepada kasus – kasus tertentu. Peraturan membantu terciptanya keseragaman operasi dan menjamin kelangsungannya terlepas dari perubahan pegawai.

6. Prosedur dalam organisasi bersifat formal dan impersonal, peraturan – peraturan organisasi berlaku disetiap orang. Prosedur yang impersonal dirancang untuk menjaga perasaan agar penilaian rasional tidak menyimpang dalam menjalankan kewajiban.

7. Suatu sikap dan prosedur untuk menerapkan suatu sistem disiplin merupakan bagian dari organisasi. Agar individu dapat bekerja dengan efisien, mereka harus memiliki keterampilan yang diperlukan dan menerapkan keterampilan tersebut secara rasional dan energik.

8. Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dengan kehidupan organisasi

9. Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan kualifikasi teknis, alih - alih koneksi politis, koneksi keluarga, atau koneksi lainnya

10. Meskipun pekerjaan dalam birokrasi berdasarkan kecakapan teknis, kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja.

Ciri ciri ini menghasilkan pengambilan keputusan yang rasional dan efisiensi administratif. Alih – alih berpengalaman adalah orang – orang yang mampu untuk membuat keputusan – keputusan teknis. Kinerja disiplin diatur dengan aturan aturan, regulasi dan kebijakan – kebijakan yang abstrak dan dikoordinasikan oleh kewenangan hierarkis merupakan usaha yang rasional dan konsisten untuk mencapai tujuan organisasi (R. Wayne Pace & Don F. Faules, 2013:45)

2.4 Ruang Lingkup Badan Narkotika Nasional

Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan kecanduan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda. (Materi Advokasi, Pencegahan Narkoba (Handbook Narkotika Nasional), hlm: 8).

Penyebaran narkoba sudah tidak lagi di kota besar, tetapi sudah masuk kota–kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi. Dewasa ini perkembangan penggunaan narkoba semakin meningkat, dan perkembangan itu tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkoba, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan

penyelidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak.

Badan Narkotika Nasional dengan maraknya atau meningkat jumlah pengguna narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah salah satu lembaga organisasi yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Oleh karena itu BNN dibentuk sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, maka di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Dari konsep yang telah peneliti paparkan di atas maka Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional dalam sosialisasi dan mengurangi jumlah pengguna

narkoba di kabupaten Tapanuli Selatan ialah berhubungan dengan beberapa bagian dari lingkungan masyarakat, orang tua, lembaga keagamaan, serta media masa sebagai sarana Komunikasi. Beberapa Strategi yang dilakukan untuk pengguna narkoba ini guna untuk mengurangi, mencegah, menanggulangi serta lainnya.

Adanya Strategi BNN guna mengurangi jumlah pengguna narkoba dengan melalui partisipasi masyarakat, melalui tempat rehabilitasi serta bentuk-bentuk pencegahannya bahkan pengetahuan serta ciri-ciri pengguna di sekitar lingkungan tempat tinggal, pekerjaan maupun di lingkungan sekitar.

Penyalahguna narkoba adalah kelompok masyarakat yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Berdasarkan tingkat ketergantungan, penyalahguna narkoba dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : coba pakai, teratur pakai, dan pecandu (suntik/ bukan suntik).

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang

beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan

Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
- Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan

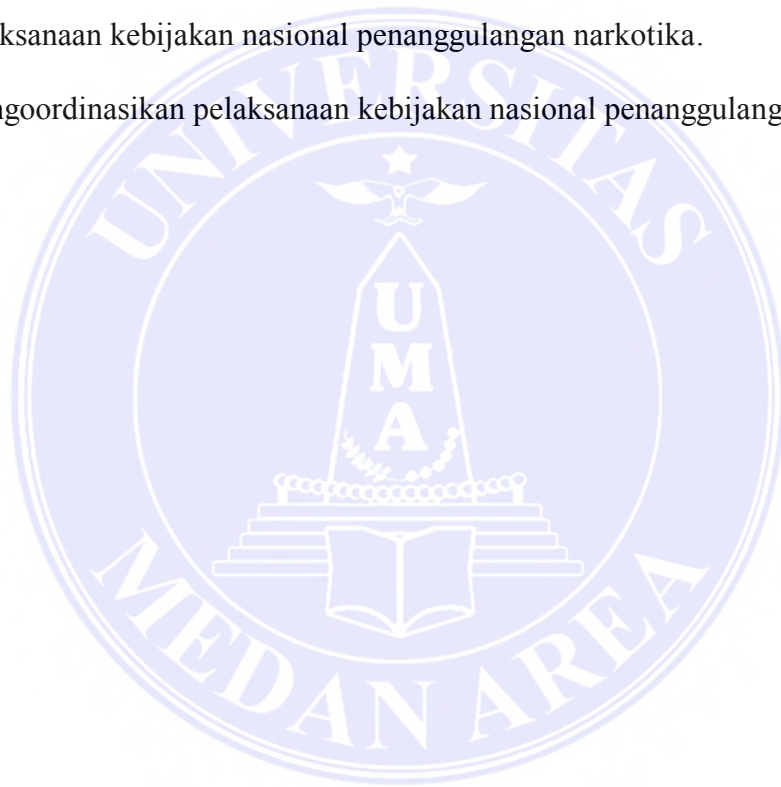
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Menghadapi permasalahan narkoba yang cenderung meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional ini diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika

Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dimana secara kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya, untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional dalam mengurangi tingkat pengguna Narkotika.

Menurut Sugiyono (2014:2) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.

Sugiyono (2014:8) Metode penelitan kualitatif dapat di artikan sebagai metode penelitan yang berlandaskan pada filsafat positvime, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

Menurut Kriyantono (2008:196) Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal – hal khusus (fakta empiris), menuju hal – hal yang umum (tataran konsep) berdasarkan hal tersebut dapat di kemukakan bahwa, metode penelitan kualitatif di lakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan dan membuat laporan penelitan secara mendetail.

Dengan metode kualitatif peneliti berharap mendapatkan data yang lengkap, pasti, lebih mendalam, lebih tuntas bermakna dan kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Untuk memperoleh hasil data yang akurat dan signifikan, data dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Penelitian deskriptif lebih mengutamakan data sekunder atau *library research* (penelitian kepustakaan), yakni :

1. Narasumber yaitu kepala Badan Narkotika Nasional dan beberapa kalangan masyarakat yang menjadi target sasaran Badan Narkotika Nasional.
2. Berupa Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

b. Data Sekunder

Bahan sekunder, berupa buku – buku bacaan yang ada hubungannya dengan materi penelitian ini, arsip, dokumen perusahaan.

Disamping data sekunder diatas dilakukan pula penelitian terhadap data primer sebagai bahan pendukung penelitian ini, yakni yang diperoleh dari informasi dan narasumber.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk itu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Kriyantono (2008:110) mengungkapkan bahwa observasi disini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui interaksi dan percakapan.

Kriyantono (2008:111) peneliti juga akan terjun langsung ikut serta dalam kegiatan yang diteliti berada dan bersama – sama diantara objek yang diteliti. Observasi partisipan merupakan metode observasi dimana periset juga ikut berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang diteliti (Kriyantono, 2008:112) namun peneliti di tuntut tidak teridentifikasi oleh orang lain agar memperoleh data yang valid.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti untuk mengetahui apa strategi dari Badan Narkotika Nasional. Peneliti dapat mengetahui dengan cara bertanya langsung tentang strategi komunikasi. Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontribusikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014 :72).

Selama observasi peneliti akan melakukan wawancara kepada orang - orang di dalamnya melalui wawancara pendahuluan, wawancara terstruktur, semistruktur, wawancara mendalam (Kriyantono,2008:100-102)

a. Wawancara pendahulu, pada wawancara ini tidak ada sistematika tertentu, informal, terjadi begitu saja, dan tidak diorganisir. Untuk itu

peneliti harus berkenalan dan beramah tamah dengan kepala dan pegawai kantor Badan Narkotika Nasional kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Wawancara mendalam, pada wawancara ini dilakukan dengan cara langsung bertatap muka dengan informan. Wawancara dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang – ulang) secara intensif. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang diwawancarai sekali) dan informan (orang yang diwawancarai beberapa kali)

3. Teknik pengumpulan data dengan dokumen

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh foto – foto atau karya tulis akademik (Sugiyono,2014:82). Di dokumen dalam penelitian ini berupa tulisan – tulisan seperti catatan harian, peraturan, dan foto – foto dan yang berkaitan dengan strategi komunikasi Badan Narkotika Nasional.

3.4 Instrumen Penelitian

Sugiyono (2014:59) menyatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Itu artinya penelitian disini harus memahami tentang metode penelitian kualitatif, menguasai teori dan menambah wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Dari segi observasi meliputi catatan buku harian, lembar pengamatan dan buku paduan. Dari segi wawancara instrumen penelitian meliputi buku catatan, alat perekam dan kamera. Dari segi dokumentasi berupa foto, kamera dan laptop.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika sebagai bagian pembinaan dengan sistem pemsarakatan. Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut.

Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2014:89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, akan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (1984) dilakukan secara interaktif melalui proses *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan).

1. Redaksi data (*data reduction*)

“ Mereduksi berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal –hal yang penting, dicari tema polanya (sugiyono, 2014 :

92). Data yang telah direduksi nantinya akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dihadapkan pada satu tujuan akhir penelitian yaitu temuan baru.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi maka kemudian data disajikan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, (Sugiyono, 2014:95). Peneliti akan menyajikan dalam bentuk teks naratif dengan struktur yang sistematis yang tersusun dalam beberapa bagian. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara mendalam untuk menemukan hubungan interaktif antara bagian - bagian tersebut.

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa sebenarnya terjadi dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawin / verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Peneliti melakukan verifikasi data karena seperti kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila dikemukakan bukti - bukti yang kuat sesuai dengan teori yang diuraikan pada bab dua, dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti

kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Peneliti juga masih tetap terbuka juga untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut itu adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun peneliti akan memisahkan mana data yang kuat atau berbobot dengan data yang lemah atau menyimpang jauh dari penelitian. Penarikan kesimpulan peneliti ini diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan nantinya dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

3.5 Pengujian Kredibilitas Data

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah di temui maupun yang baru (Sugiyono, 2014:122). Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti akan fokus pada data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah di cek kembali kelapangan data sudah benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat di ahiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat

melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. (Sugiyono, 2014:125) peneliti akan membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat untuk mengetahui kesalahan dan kekurangan. Peneliti akan membaca buku referensi, hasil penelitian yang berkaitan dengan dokumen – dokumen, dan referensi lain yang terkait untuk menambah wawasan sehingga data – data yang ditemukan lebih kredibel.

3. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2014 : 125) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi tehnik dengan cara wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu Kepala dan staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan, pagi, siang hari.

4. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah alat bantu rekam, rekaman wawancara, foto – foto dan kamera. Hal ini diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan peneliti. Data – data yang telah dikemukakan perlu di lengkapi dengan foto –foto atau dokumen autentik, sehingga data lebih dapat dipercaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab perumusan masalah. Adapun kesimpulan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan

Hal ini biasa dilihat pada upaya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan atau pencegahan narkoba atau NAPZA yaitu pelayanan dalam setiap masyarakat dan penyuluhan, sedangkan dalam upaya penanggulangannya, yaitu pembuatan media yang dapat mengefektifkan tujuan dari pencegahan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan Batang Angkola.

2. Strategi yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Batang Angkola dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak sendiri dalam menangani tugas dan fungsinya meliputi berbagai program, diantaranya:

- a. Penyuluhan pelajar SMP, dan SMA dari program penyuluhan tersebut terbentuklah beberapa kegiatan di berbagai sekolah yakni di SMP N 2 Batang Angkola dengan kegiatan FGD (Fokus Group Discoution) tentang

pembangunan masyarakat berwawasan anti narkoba lingkungan pendidikan dengan peserta 40 orang pelajar yang dikoordinator oleh kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.

- b. Melakukan rapat kerja di Desa Sorik dalam rangka pemberdayaan lingkungan masyarakat dengan jumlah peserta 30 orang dan peserta diantaranya para masyarakat sekitar serta rapat kerja dan workshop di SMKN 1 Batang Angkola dalam rangka pemberdayaan masyarakat anti narkoba di Lingkungan Pendidikan dengan para peserta adalah tenaga pendidik di SMKN 1 Batang Angkola.
- c. Pola – pola komunikasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjalankan tugas, pola komunikasi tergantung dari tema ataupun bentuk acara seperti pola komunikasi satu arah yang membuat acara *Talkshow* di radio, Dua arah acara seminar, multi arah FGD (Focus Group Discussion)
- d. Media yang digunakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Radio, Koran, Stiker, spanduk dan beberapa dokumentasi dari staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan
- e. Strategi yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional Tapanuli Selatan yang bertempat di Batang Angkola adalah asistensi dalam rangka penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba dan rapat evaluasi advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba oleh stakeholder kecamatan.

3. Hambatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dalam upaya melaksanakan program meurunkan dan pencegahan penyalagunaan narkoba di kalangan masyarakat mengalami beberapa hambatan-hambatan diantaranya:
 - a. Tidak semua daerah mudah terjangkau.
 - b. Kurangnya personil dan sumber daya manusia.
 - c. Masyarakat kurang terbuka mengenai penyalahgunaan dari bagian keluarga.

B. Saran

Mengingat begitu kompleksnya penanggulangan bahaya narkotika, maka strategi komunikasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan harus benar-benar bekerja sama dengan baik dengan masyarakat maupun petugas-petugas hukum yang ada. Bagi organisasi pemerintah. Pemerintah meningkatkan kerja sama antar organisasi pemerintah maupun non pemerintah dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba dan menyelamatkan generasi muda, dan bagi masyarakat perlu dukungan dan partisipasi sangatlah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan agar menghindari tempat-tempat hiburan yang dapat memicu terjadinya transaksi barang-barang terlarang seperti narkoba.

Meningkatkan kinerja-kinerja staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi masalah maupun yang menjadi hambatan dalam menjalankan tugas maupun perencanaan hal-hal baru yang dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Membangun Fasilitas yang rehabilitas yang layak di setiap Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Frekuensi komunikasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan yang sangat minim agar lebih ditingkatkan dan soasialisasi yang di lakukan di setiap daerah dapat berulang ulang minimalnya satu kali satu bulan agar warga paham betul dengan dampak dan bahaya narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aw Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*.
- Effendy Uchjana Onong. 2009. *Ilmu komunikasi (teori dan praktek)*
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju,)
- Hermawan Agus. 2012. *Komunikasi pemasaran, sejarah komunikasi* hlm:4
- Kriyantono Rachmat. 2008. *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*.Jakarta. Kencana
- Morissan. 2014. *Teori komunikasi (Elemen Komunikasi)* hlm:16
- Mulyana Deddy, 2005, *Ilmu Komunikasi, Bandung*: Rosdakarya
- Pace Wayne. R & Faules F. Don editor Mulyana Deddy.2013 *komunikasi organisasi*
- Ngalimun, S,Pd.,M.Pd., M.I.kom. 2017. *Ilmu komunikasi sebuah pengantar praktis (strategi meningkatkan kinerja perusahaan)* hlm:33
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R &D*, Bandung
- Suryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Komunikasi* . Pustaka Setia
- Tjiptono, Fandy, 2000. *Strategi komunikasi, Konsep dan Pengertian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Pace, R. Wayne *et al.*, *Techniques for Effective communication*, Adisson – Westley Publishing Company, Massachusetts-ontario 1979 dalam Effendy Uchjana Onong. 2009. *Ilmu komunikasi (teori dan praktek)*
- Blau dan Scott (1962) dalam R.Wayne Pace Don F. Faules dalam Deddy Mulyana M.A., PH.D. *komunikasi Organisasi* 2013.

Sumber lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> (diakses tanggal 14 januari 2017)

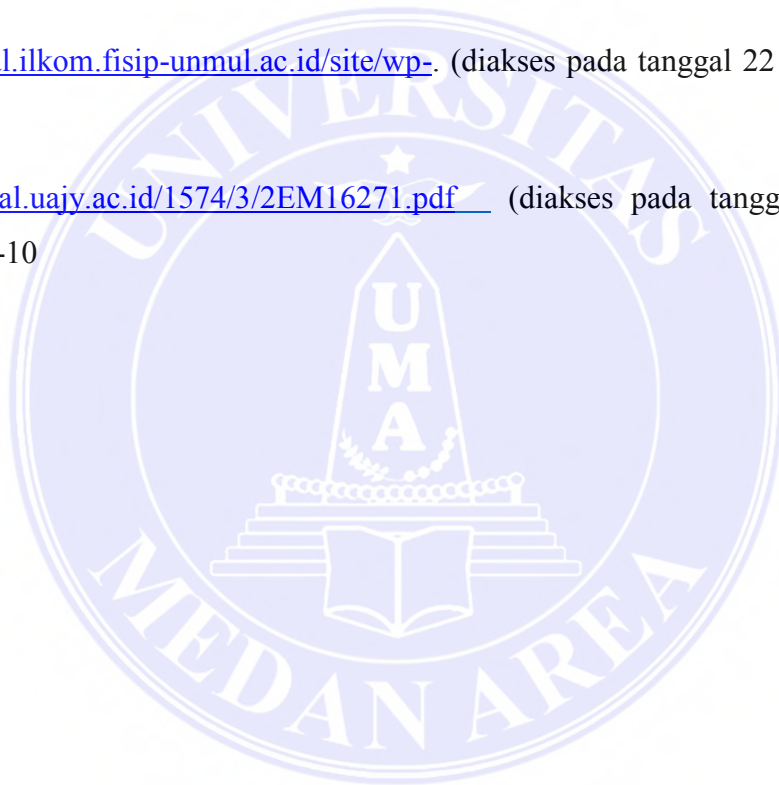
<http://www.scribd.com/doc/19024789/KUHP-Baru-Indonesia>. (diakses tanggal 14 Januari 2017)

Materi Advokasi, *Pencegahan* Narkoba (Handbook Narkotika Nasional), hlm: 8

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotik

<http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-> (diakses pada tanggal 22 Januari 2017)
hlm : 432

<http://e-journal.uajy.ac.id/1574/3/2EM16271.pdf> (diakses pada tanggal 9 Februari 2017) hlm: 9-10



Lampiran 1.

STRATEGI KOMUNIKASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
TAPANULI SELATAN DALAM MENURUNKAN TINGKAT
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pola komunikasi apa saja yang dilakukan BNN dalam menjalankan tugas-tugasnya?
2. Adakah strategi komunikasi khusus yang digunakan untuk menjalankan sebuah tugas khususnya di daerah Kecamatan Batang Angkola ?
3. Kegiatan komunikasi seperti apa saja yang digunakan BNN dalam memperkenalkan tugas utama dihadapan masyarakat?
4. Seberapa sering frekuensi komunikasi yang diterapkan BNN dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba?
5. Adakah data yang membuktikan strategi komunikasi BNN berjalan sesuai dengan yang diharapkan khususnya data dari Kecamatan Batang Angkola?
6. Masyarakat seperti apakah yang menjadi target sasaran kegiatan BNN ?
7. Adakah perbedaan pelayanan dalam setiap masyarakat?
8. Adakah masalah yang menjadi hambatan dalam menjalankan setiap tugas?
9. Apakah langkah- langkah dari komunikasi tersebut selalu berhasil?
10. Penyuluhan seperti apa sajakah yang digunakan BNN?
11. Apakah penyuluhan yang dilakukan selalu berjalan efektif?
12. Adakah masalah yang selalu memberatkan dalam setiap pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan?

Lampiran 1. Dokumentasi Asistensi di Kecamatan Batang Angkola



Lampiran 3. Dokumentasi *Focus Group Discussion* (FGD) SMP Negeri 2 Batang Angkola



Lampiran 4. Dokumentasi Jejaring Batang Angkola



Lampiran 5. Dokumentasi Raker Desa Sorik Batang Angkola



Lampiran 6. Dokumentasi *Thalk Show* Kiss FM Kota Padang Sidempuan



Lampiran 7. Dokumentasi *Test Urine* SMK 1 Batang Angkola

